

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA
SIDOREJO, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



OLEH:

KURNIAWAN WIBISONO PARATON

NPM. 16206015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2020



**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA
SIDOREJO, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh:

KURNIAWAN WIBISONO PARATON

NPM 16206015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2020**



HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA SIDOREJO, KECAMATAN
KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KURNIAWAN WIBISONO PARATON
NPM: 16206015

Dosen Pembimbing:

Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2020



HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA SIDOREJO, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

Diajukan Oleh:

KURNIAWAN WIBISONO PARATON

NPM: 16206015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal: 15 Juni 2020

TIM PENGUJI
Ketua


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256

Anggota I


Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.
NIP. 0020273

Anggota II


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Ynag Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Pak Viktor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan dosen pengajar penulis;
3. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku dosen pengajar penulis, sebagai dosen wali angkatan 2016, maupun sebagai dosen pembimbing penulisan skripsi penulis, yang telah memberikan saran, kritik, dorongan, semangat, waktu, pikiran, tenaga dan meminjamkan buku untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H. selaku dosen pengajar penulis, telah memberikan saran dan tenaga kepada penulis:



5. Seluruh dosen dan staff karyawan maupun alumni Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
6. Seluruh karyawan Perpustakaan UKDC yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini;
7. Pihak Pemerintah Desa Sidorejo terutama Pak Sekertaris Desa yang telah memberikan data dan wawancara;
8. Pak Ketua BPD dan Sekertaris BPD dan beserta jajaranya yang telah bersedia memberikan waktu untuk wawancara;
9. Kedua orang tua tercinta penulis (Bapak Gianto) dan (Ibu Cicilia W. Catharina) yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis;
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 Hendrikus, Martin, Elsa, Sally, Tedy, Andre, Selvi, Albert, Stefanus, Jefri dan Semuanya.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sabutkan satu persatu.

Surabaya, 20 Juni 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
ABTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	5
1.5.1. Penelitian Terdahulu	5
1.5.2. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.....	6
1.5.3. Sistem Pemerintahan.....	9
1.5.4. Pemerintahan Wilayah	12
1.5.5. Pemerintahan Desa.....	13
1.5.6. Hubungan Antara Tingkat-Tingkat dalam Pemerintahan	19
1.5.7. Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Daerah	21
1.5.8. Dasar-Dasar Umum Pemerintahan Yang Baik	24
1.6. Metode Penelitian	25
1.6.1. Jenis Penelitian.....	25
1.6.2. Pendekatan Penelitian	25
1.6.3. Jenis dan Bahan Hukum.....	26
1.6.4. Proses Pengumpulan Data.....	27
1.6.5. Pertanggung Jawaban Sitematika	27
BAB II PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA DI DESA SDOREJO	



2.1. Peraturan Desa dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan.....	29
---	----

2.2. Kewenangan BPD Menurut UU Desa	37
---	----

BAB III UPAYA PENINGKATAN PERAN AKTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN REGULASI PERATURAN DESA DI DESA SIDOREJO, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO

3.1. Kendala-Kendala yang dihadapi BPD Desa Sidorejo dalam membuat PERDES	52
---	----

3.2. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Peran BPD	57
---	----

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	63
-----------------------	----

4.2. Saran.....	64
-----------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan. 2.1. Hierarki Peraturan Desa Undangan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...	29
Bagan. 2.2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...	29
Bagan. 2.3. Hierarki Naviasky dalam Konteks Indonesia	31
Bagan. 2.4. Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo	38
Bagan. 2.5. Struktur Badan Pemerintahan Desa Sidorejo.....	40
Bagan. 2.6. Alur Pembuatan Peraturan Desa	43



ABSTRAKSI

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah agar memberikan pengetahuan tambahan terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam merancang Peraturan Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Metode Penelitian ini Menggunakan penelitian secara Yuridis empiris. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian penting dalam pembuatan Peraturan Desa. Pemerintah Desa merupakan kunci keberhasilan dari masyarakat yang maju dalam sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Dalam Praktiknya Badan Permusyawaratan Desa kurang berperan efektif karena merasa bahwa Kepala Desa adalah satu tingkat diatas Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa merupakan sistem pemerintahan yang sejajar yang saling mengawasi dan mengoreksi satu sama lain juga keduanya merupakan mandat dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Erga Yuhendra mengenai permasalahan tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi, jurnal ini menganalisis tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legilatif yang berjalan kurang efektif. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo dalam membuat Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa sudah cukup baik, karena BPD berperan sesuai aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun Dalam menjalankan tugasnya membuat Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo mempunyai beberapa kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi antara lain terkait dengan Komunikasi, Financial dan Legal Drafting.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Desa.



ABSTRACT

The purpose of this research is to provide additional knowledge related to the role of the Village Consultative Body in drafting Village Regulations until they are established as Village Regulations. This research method uses empirical juridical research. Through this research the researcher offers that the Village Consultative Body is an important part in making Village Regulations. The Village Government is the key to the success of the advanced society in the national government system, the Village Government has a very significant role in managing social processes in the community. The main task that must be carried out by the Village Government is how to create a democratic life, and provide good social services, so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, safe and fair life. In practice the Village Consultative Body is less effective because it feels that the Village Head is one level above the Village Consultative Body. The Village Consultative Body and the Village Head are a parallel government system that supervises and corrects each other as well as both are mandates from the community. The Village Consultative Body is the holder and full implementation of the sovereignty of the village community. Like research conducted by Erga Yuhandra on issues concerning the authority of the Village Consultative Body in carrying out the legislative function, this journal analyzes the role of the Village Consultative Body in carrying out the legislative functions that are running less effectively. In this study, it can be concluded that the role of the Sidorejo Village Consultative Body in making the Village Regulation Draft until it is stipulated to be a Village Regulation is good enough, because the BPD plays a role in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages. However, in carrying out their duties in drafting Village Regulations until they are stipulated as Village Regulations, the Village Consultative Body of Sidorejo has several obstacles which to date have not been overcome, such as those related to Communication, Financial and Legal Drafting.

Keywords: Village Government, Village Consultative Body, and Village Regulation